

**JAMINAN TERHADAP NAFKAH ANAK AKIBAT DARI
PERCERAIAN PNS**

(Studi Putusan Nomor 0742/Pdt.G/2012/PA.Ska)



Diajukan untuk Memenuhi Tugas dan Syarat-syarat Guna Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum dalam Ilmu Hukum Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Surakarta

Oleh :
AGITA PUTRI ADHIRAHAYU
C 100 080 029

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA

2015

HALAMAN PENGESAHAN

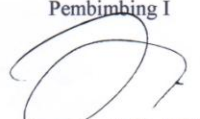
Naskah Publikasi ini telah diterima dan disahkan oleh
Dewan Penguji Skripsi Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Surakarta

Pada

Hari : Rabu


Tanggal : 04 Oktober 2015

Pembimbing I



(Darsono, S.H., MH)

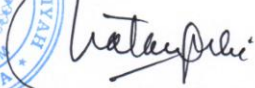
Pembimbing II



(Mutimatun Ni'ami, S.H., M.Hum)



Mengetahui
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Surakarta



(Dr. Natangsa Surbakti, S.H., M.Hum)

JAMINAN TERHADAP NAFKAH ANAK AKIBAT DARI PERCERAIAN PNS (STUDI PUTUSAN NOMOR 0742/Pdt.G/2012/PA.SKA). Agita Putri Adhirahayu, C 100 080 029, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Surakarta.

ABSTRAK

Hakim mempunyai kebebasan mutlak dalam memutuskan suatu perkara. Hakim dalam memutuskan perkara perceraian berdasarkan pertimbangan alat bukti sesuai dengan KUHPerdota dan PP No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Dalam penelitian ini menggunakan metode pendekatan hukum yuridis empiris jenis penelitiannya deskriptif. Kesimpulan penelitian menjelaskan: (1) Pertimbangan hakim dalam mengabulkan gugatan perceraian yang di lakukan oleh PNS berdasarkan alat bukti pengakuan sesuai Pasal 19 huruf f PP No. 9 Tahun 1975 dan alat bukti saksi sesuai Pasal 1907 KUHPerdota. (2) Pertimbangan hakim dalam menentukan hak nafkah anak termuat dalam konvensi hak-hak anak dan pertimbangan hakim sesuai Pasal 229 KUHPerdota mengenai kemampuan bekas suami atau bekas istri yang merawat anak-anak.

Kata Kunci: Jaminan Nafkah Anak, Akibat Perceraian, Pegawai Pemerintah.

TO GUARANTEE KIDS LIVELIHOODS DUE FROM DIVORCE PNS (STUDY OF DECISION No. 0742 / Pdt.G / 2012 / PA.SKA). Agita Putri Adhirahayu, C 100 080 029, Faculty of Law, University of Muhammadiyah Surakarta.

ABSTRACT

Judges have absolute freedom in deciding a case. The judge in deciding a divorce case based on the consideration of evidence in accordance with the Civil Code and PP 9 Year 1975 on Implementation of Law No. 1 of 1974 About Marriage. In this research using empirical juridical legal approach descriptive type of research. Conclusion of the study explained: (1) Consideration of the judges in favor of divorce done by civil servants based on the recognition of the evidence in accordance with Article 19 letter f PP 9 In 1975 and the evidence of witnesses pursuant to Article 1907 of the Civil Code. (2) Consideration of the judge in determining the rights of children living contained in the convention of children's rights and the consideration of judges under Article 229 of the Civil Code regarding the ability of ex-husband or ex-wife who care for children.

Keywords: Children Livelihoods Security, a result of divorce, Government Employees.

PENDAHULUAN

Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Apabila mereka melangsungkan perkawinan maka timbullah hak dan kewajiban antara suami istri secara timbal balik, demikian juga akan timbul hak dan kewajiban antara orang tua dan anak secara timbal balik.

Dikarenakan tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, maka Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mempersulit terjadinya perceraian. Perceraian adalah putusnya perkawinan antara suami dengan istri karena tidak terdapat kerukunan dalam rumah tangga atau sebab lain seperti mandulnya istri atau suami dan setelah sebelumnya diupayakan perdamaian dengan melibatkan keluarga kedua belah pihak. Perceraian baru dapat dilaksanakan apabila telah dilakukan berbagai cara untuk mendamaikan kedua belah pihak untuk tetap mempertahankan keutuhan rumah tangga mereka dan ternyata tidak ada jalan lain kecuali hanya dengan jalan perceraian. Dengan perkataan lain bahwa perceraian itu adalah sebagai *way out* bagi suami istri demi kebahagiaan yang dapat diharapkan sesudah terjadinya perceraian terjadi.¹

¹ Abdul Manan, "Problematika Perceraian Karena Zina dalam Proses Penyelesaian Perkara di Lingkungan Peradilan Agama" dalam Jurnal Mimbar Hukum, 2001, <https://www.google.com/=Abdul+Manan%2C+%E2%80%9CProblematika+Perceraian+Karena+Zina+%2C+2001&ie=utf-8&oe=utf-8>, diunduh 24 Agustus 2014, pukul 19:30 WIB.

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 walaupun orang tua sudah bercerai, orang tua masih terikat pada kewajiban untuk memelihara anak-anak yang telah lahir dari perkawinan mereka. Juga dapat diketahui bahwa baik ibu ataupun bapak mempunyai hak yang sama terhadap pemeliharaan anak. Dalam hal ini dengan siapapun anak ikut, ayah sebagai mantan suami tetap berkewajiban memberikan nafkah kepada anak untuk biaya hidup dan pendidikannya sampai anak menjadi dewasa atau anak tersebut telah kawin. Namun demikian ibu juga dapat ditetapkan untuk ikut memikul beban biaya pemeliharaan anak tersebut.² Pasal 300 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menjelaskan bahwa yang melaksanakan kekuasaan orang tua adalah bapak. Mengenai hal ini pula telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Menurut ketentuan pada Pasal 41 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa, baik ibu atau bapak berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, dimana bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak-anak itu. Akan tetapi bilamana bapak dalam kenyataannya tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut.³

Pemberian nafkah dalam hukum keluarga telah meletakkan beberapa hal fundamental, kaitannya sebagai prinsip dan latar belakang keterbentukan sub-sub hukum di dalamnya. Konstruksi sub-sub hukum keluarga dengan demikian

² Rifyal Ka'bah, "Permasalahan Perkawinan" dalam Jurnal Varia Peradilan, 2008, www.jurnal.unitas-pdg.ac.id/downloadfilemh.php?file=JURNAL.docx, diunduh 21 Desember 2014, pukul 15:36 WIB.

³ H.M. Djamil Latif, 1982, *Aneka Hukum Perceraian di Indonesia*, Jakarta: Ghalia Indonesia, hal. 115.

melibatkan asas-asas yang bersinergi dengan format hukum itu sendiri. Berdasarkan asas itu, maka hukum keluarga melahirkan konsekuensi berupa terciptanya hak dan kewajiban yang saling timbal-balik di antara person-person dalam keluarga. Di antara hak dan kewajiban itu, adalah ketika jalinan keluarga membutuhkan penghidupan guna menopang jalannya rumah tangga. Dalam situasi ini, maka adalah kemutlakan jika harus ada yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan itu, mulai sandang, pangan dan papan. Semua hal itu, oleh agama secara umum disebut sebagai nafkah.⁴

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis empiris, yakni mengidentifikasi dan mengkonsepsikan hukum sebagai intitusi sosial yang *riil* dan fungsional dalam kehidupan yang mempola.⁵ Jenis penelitian menggunakan deskriptif, yaitu suatu metode penelitian yang hanya menggambarkan atau melukiskan keadaan objek yang akan diteliti. Lokasi penelitian di Pengadilan Agama Surakarta karena di Pengadilan Agama Surakarta cukup banyak penanganan perkara tentang perkara perceraian dan yang menyangkut mengenai tanggung jawab orang tua terhadap nafkah anak, yang memungkinkan banyak pula problematika mengapa perkara itu banyak terjadi di Pengadilan Agama Surakarta, sehingga layak rasanya jika penulis mengambil lokasi tersebut sebagai objek penelitian. Yang dijadikan subjek dalam penelitian ini adalah responden, dan dalam hal ini adalah Panitera Muda Hukum dan Hakim Pengadilan Agama Surakarta.

⁴ Erfani, 2012, *Implikasi Nafkah Dalam Konstruksi Hukum Keluarga*, dalam <http://dapurhukumanda.blogspot.co.id/2014/04/implikasi-nafkah-dalam-konstruksi-hukum-keluarga.html>, diunduh 16 Desember 2014, pukul 14:25 WIB.

⁵ Roni Hanitiyo Soemitro, 1990, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta: Ghalia Indonesia, hal. 34.

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan yaitu melakukan pengumpulan data dengan jalan mempelajari bahan hukum primer yang berupa peraturan perundang-undangan termasuk pula yurisprudensi, dan bahan hukum sekunder yaitu yang berasal dari beberapa literatur atau buku-buku yang relevan dengan permasalahan yang dikaji serta bahan hukum tersier berupa kamus hukum, yang mana semua bahan hukum tersebut dipelajari dan dikaji untuk dijadikan pedoman atau landasan dalam menyusun dan melakukan penelitian.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pertimbangan Putusan Hakim dalam Mengabulkan Gugatan Perceraian

Hakim dalam memutuskan dikabulkannya suatu perceraian, khususnya PNS yang mengajukan permohonan cerai berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan yang membuat keputusan tersebut dapat adil dan tidak ada pihak yang dirugikan dalam keputusan tersebut.

Pertimbangan hakim dalam memutuskan kasus perceraian berdasarkan pada alasan-alasan yang mendasari terjadinya Pemohon mengajukan perceraian. Berdasarkan hasil data putusan Nomor 0742/Pdt.G/2012/PA.Ska.

Alasan yang dijadikan bahan pertimbangan hakim yaitu istri Pemohon telah beberapa kali melakukan perselingkuhan, sehingga sering terjadi pertengkaran dan mengakibatkan rumah tangga menjadi tidak nyaman lagi dan pemohon telah melakukan mediasi melalui keluarga, sanak famili dan Pengadilan Agama, namun hasilnya nihil.

Dapat diketahui bahwa alasan-alasan yang mendasar pada kasus perceraian putusan Nomor 0742/Pdt.G/2012/PA Surakarta yaitu tentang perselingkuhan yang membuat rumah tangga mengalami pertengkaran secara terus-menerus. Ada persamaan alasan pada pemohon termohon yaitu adanya perselingkuhan. Perbedaan pada tindakan yang melakukan perselingkuhan. Dari pihak pemohon menuduh bahwa termohon melakukan perselingkuhan. Sementara ini dari termohon perselingkuhan dilakukan oleh pemohon dan pemohon sering main judi.

Putusan Nomor 0742/Pdt.G/2012/PA Surakarta dapat diketahui bahwa putusan tersebut sah. Alasan sahnya putusan selain persamaan pengakuan dari pemohon dan termohon karena perselingkuhan juga diperkuat oleh saksi yang dibawa pemohon dan termohon. Saksi dari Pemohon ada dua yaitu Supardiman Hadi Hardoyo bin Hadi Suwarno umur 59 tahun dan Joko Sugiyo bin Sugimun Harso Suwito umur 52 tahun. Sementara ini, saksi dari Termohon hanya satu yaitu Masrudi bin Pardi umur 65 tahun. Meskipun keterangan saksi jumlahnya tidak sama, tetapi putusan tersebut dianggap sah, karena ada alat bukti lain yaitu pengakuan dan surat. Hal ini sesuai dengan pendapat Manan⁶ yang mengungkapkan kesaksian itu haruslah datang dari dua orang saksi atau satu orang saksi tetapi perlu adanya bukti yang lain, kecuali dalam hal yang diperkenankan mempergunakan kesaksian *istifadhoh (de auditu)* atau kesaksian seorang yang tidak mendengar langsung adanya pertengkaran (perselingkuhan) sebagaimana yang telah disepakati oleh para ahli hukum Islam.

⁶ Abdul Manan, 2005, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, Jakarta: Kencana, hal. 375.

Hakim yang memeriksa perkara menentukan siapa diantara pihak-pihak yang berperkara yang diwajibkan memberikan bukti, apakah pihak pemohon atau pihak termohon. Dengan perkataan lain menurut Kansil dan Christine,⁷ hakim sendiri yang menentukan pihak yang selanjutnya alat bukti dalam perkara perdata diatur dalam Pasal 164 HIR/284 R.Bg dan Pasal 1866 KUH Perdata adalah: (1) *Alat bukti surat*, (2) *Alat bukti saksi*, (3) *Alat bukti persangkaan*, (4) *Alat bukti pengakuan*, (5) *Alat bukti sumpah*

Alat bukti adalah segala sesuatu yang oleh Undang-Undang ditetapkan dapat dipakai membuktikan sesuatu. Alat bukti disampaikan dalam persidangan pemeriksaan perkara dalam tahap pembuktian. Pembuktian adalah upaya yang dilakukan para pihak dalam berperkara untuk menguatkan dan membuktikan dalil-dalil yang diajukan agar dapat meyakinkan hakim yang memeriksa perkara, yang harus dibuktikan dalam sidang adalah segala sesuatu yang didalilkan disangkal atau dibantah oleh pihak lawan.

Pertimbangan Hakim dalam Menentukan Hak Nafkah Anak

Kewajiban suami yang telah bercerai dengan istri mempunyai kewajiban memberikan nafkah kepada anak sebesar 1/3 dari gaji. Hak nafkah untuk anak akan berlangsung terus sampai anak itu menikah, telah bekerja atau bisa menghidupi dirinya sendiri. Dalam perceraian, sesuai Pasal 8 ayat (2) bahwa seorang suami yang telah bercerai mempunyai kewajiban memberikan nafkah kepada anak sebesar 1/3 gaji yang diberikan kepada mantan istri yang mengasuh anak.

⁷ C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil, 1996, *Pokok-Pokok Etika Profesi Hukum*, Jakarta: Pradnya Pramita, hal. 46

Pemberian nafkah 1/3 dari gaji untuk mantan istri dan anak dalam Putusan Nomor 0742/Pdt.G/2012/PA Surakarta tidak dinyatakan 1/3 dari gaji, tetapi ditunjukkan dengan jumlah besar rupiah yang diberikan kepada mantan untuk nafkah *iddah* sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan *mut'ah* berupa uang sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah). Kewajiban PNS dalam memberikan nafkah kepada tiga orang anaknya Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan.

Khusus mengenai anak, suatu keputusan yang akan diambil oleh hakim akan menjadi sangat penting sekali, ini dikarenakan menyangkut tentang kehidupan dan masa depan dari seorang manusia yang belum bisa bertindak secara normal. Umumnya apabila anak yang masih di bawah umur, maka hak untuk memelihara dan mendidik anak tersebut akan diberikan kepada ibunya, hal ini sesuai dengan kebiasaan dimasyarakat dan juga peraturan perundang-undangan yang berlaku sekarang, dikarenakan alasan bahwa anak-anak di bawah umur masih sangat memerlukan perhatian dari seorang ibu, sedangkan kepada seorang ayah diberikan tanggung jawab untuk membiayai kebutuhan hidup dan pendidikan anak-anak mereka tersebut sampai dewasa.⁸

Perawatan dan mendidik anak merupakan tanggung jawab seorang ayah dan ibu, meskipun terjadi perceraian jangan sampai mengurangi nafkah yang wajar bagi ibu dan anaknya sesuai keadaannya. Mengenai pertimbangan hakim Pengadilan Agama Surakarta dalam menetapkan nafkah anak yang mendasarkan pertimbangannya pada rasa kemanusiaan dan melindungi hak anak setelah orang

⁸ Muhammad Syaifuddin, dkk., 2012, *Hukum Perceraian*, Jakarta: Sinar Grafika, hal. 164.

tuanya berpisah, disamping itu juga didasarkan atas kewajiban seorang ayah untuk memberi nafkah pada anaknya.

Salah satu asas yang termuat dalam konvensi hak-hak anak yang menyebutkan bahwa anak berhak untuk tumbuh dan dibesarkan dalam suasana penuh kasih sayang dan rasa aman sedapat mungkin berada di bawah asuhan serta tanggung jawab orang tuanya sendiri.

Terhadap anak-anak yang belum dewasa, menurut Pasal 229 KUHPerdara, oleh Pengadilan harus ditentukan sekali, kepada siapa dari bekas suami dan bekas istri anak-anak itu harus turut. Apabila yang disertai anak itu tidak mampu memikul biaya pemeliharaan dan pendidikan anak, maka menurut Pasal 230 KUHPerdara, Hakim dapat menentukan sejumlah uang yang harus diberikan oleh pihak lain untuk turut membayar biaya pemeliharaan dan pendidikan anak-anak tadi.

Pertimbangan hakim atas perkara Keputusan Nomor 0742/Pdt.G/2012/PA Surakarta sudah tepat, karena sesuai peraturan hukum formil dan materiil yang mengatur tentang pemeliharaan anak berada di tangan ibu akan tetapi dalam hal salah satu orang tua dalam hal ini ayahnya yang telah perselingkuhan dengan wanita lain, maka pemegang hak asuh anak tetap pada ibunya. Hal ini untuk menjamin masa depan dan moral anak

PENUTUP

Simpulan

Pertama, Putusan Nomor 0742/Pdt.G/2012/PA Surakarta menunjukkan pertimbangan hakim berdasarkan alasan yang mendasar pada kasus perceraian

yaitu tentang perselingkuhan yang membuat rumah tangga mengalami pertengkaran secara terus-menerus. Ada persamaan alasan pada pemohon termohon yaitu adanya perselingkuhan. Perbedaan pada tindakan yang melakukan perselingkuhan. Pihak Pemohon menuduh bahwa Termohon melakukan perselingkuhan, sedangkan dari Termohon perselingkuhan dilakukan oleh Pemohon dan Pemohon sering main judi (Pasal 39 ayat (2) huruf a jo Pasal 19 Peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975).

Kedua, ada dua bukti yang menjadi pertimbangan hakim dalam perceraian Putusan Nomor 0742/Pdt.G/2012/PA Surakarta yaitu pengakuan Pemohon dan Termohon ada kesamaan yaitu pengakuan sering terjadi pertengkaran yang tidak dapat diselesaikan. Hal tersebut sesuai Pasal 19 huruf f PP No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menjelaskan bahwa antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Alat bukti saksi diatur dalam Pasal 168-172 HIR, Pasal 306-309 RBg, dan Pasal 1895, 1902-1908 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Dalam Pasal 171 HIR (Pasal 308 ayat (2) RBg) dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1907. Saksi-saksi yang diajukan itu adalah penggugat yang melihat, mendengar sendiri peristiwa-peristiwa yang menjadi persoalan

Ketiga, salah satu asas yang termuat dalam konvensi hak-hak anak yang menyebutkan bahwa anak berhak untuk tumbuh dan dibesarkan dalam suasana penuh kasih sayang dan rasa aman sedapat mungkin berada dibawah asuhan serta tanggung jawab orang tuanya sendiri. Menurut Pasal 229 KUHPdata, oleh

Pengadilan harus ditentukan sekali, kepada siapa dari bekas suami dan bekas istri anak-anak itu harus turut. Pertimbangan hakim atas perkara keputusan Nomor 0742/Pdt.G/2012/PA. Surakarta sudah tepat. Karena walaupun peraturan hukum formil dan materiil yang mengatur tentang pemeliharaan anak berada di tangan ibunya, untuk menjamin masa depan dan moral anak.

Saran

Kepada Pengadilan Agama, kewenangan Peradilan Agama yang semakin luas harus diimbangi dengan peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) aparatur pengadilan, sarana dan prasarana yang memadai, serta ketentuan hukum yang aplikatif. Dengan demikian paradigma baru peradilan agama benar-benar dapat menjawab tuntutan dan problem hukum yang berkembang di masyarakat.

Kepada pemerintah, disarankan untuk membuat kebijakan mengenai tanggung jawab orang tua yang bercerai. Meskipun telah diatur dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 116 huruf (h) namun alangkah baiknya jika dalam Undang-Undang no.1 tahun 1974 juga mengatur secara rinci tentang tanggung jawab orang tua yang bercerai untuk memberikan nafkah terhadap anak-anaknya. Karena membesarkan anak merupakan kewajiban orang tua, sehingga kebijakan yang dibuat pemerintah dapat melindungi anak akibat perceraian orang tua.

Kepada orang tua, disarankan untuk memiliki kesadaran akan tanggung jawabnya dalam merawat anak. Meskipun orang tua sudah bercerai, orang tua tetap merawat anak secara bersama-sama untuk kepentingan dan masa depan anak.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Kansil, C.S.T., dan Kansil, Christine S.T., 1996, *Pokok-Pokok Etika Profesi Hukum*, Jakarta: Pradnya Pramita.
- Latif, H.M. Djamil, 1982, *Aneka Hukum Perceraian di Indonesia*, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Manan, Abdul, 2005, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, Jakarta: Kencana.
- Muhammad Syaifuddin, dkk., 2012, *Hukum Perceraian*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Soemitro, Roni Hanitiyo, 1990, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta: Ghalia Indonesia.

Jurnal :

- Erfani, 2012, *Implikasi Nafkah Dalam Konstruksi Hukum Keluarga*, dalam <http://dapurhukumanda.blogspot.co.id/2014/04/implikasi-nafkah-dalam-konstruksi-hukum-keluarga.html>, diunduh 16 Desember 2014, pukul 14:25 WIB.
- Ka'bah, Rifyal, "Permasalahan Perkawinan" dalam Jurnal Varia Peradilan, 2008, www.jurnal.unitas-pdg.ac.id/downloadfilemh.php?file=JURNAL.docx, diunduh 21 Desember 2014, pukul 15:36 WIB.
- Manan, Abdul, "Problematika Perceraian Karena Zina dalam Proses Penyelesaian Perkara di Lingkungan Peradilan Agama" dalam Jurnal Mimbar Hukum, 2001, <https://www.google.com/=Abdul+Manan%2C+%E2%80%9CProbl+ematika+Perceraian+Karena+Zina+%2C+2001&ie=utf-8&oe=utf-8>, diunduh 24 Agustus 2014, pukul 19:30 WIB.